

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan memiliki fungsi penting sebagai sarana edukasi, riset, data, informasi, rekreasi serta preservasi bagi masyarakat. Oleh sebab itu, perpustakaan dianggap memiliki peran penting sebagai agen pembangunan, perubahan, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai agen yang memiliki peran penting dalam masyarakat, perpustakaan harus dapat menyentuh masyarakat dari berbagai macam golongan, karena perpustakaan merupakan salah satu wadah penting untuk kepuasan informasi bagi masyarakat yang berasal dari berbagai golongan guna mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan.

Pertumbuhan ekonomi dan sosial terpusat seperti pembangunan ekonomi serta infrastruktur selama ini telah memperburuk ketidaksetaraan sehingga menciptakan masyarakat dengan tingkat golongan yang jauh berbeda-beda, hal ini berdampak kepada masyarakat dengan munculnya pengucilan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan kurang beruntung (Agusalim, 2015). Hal tersebut menimbulkan pemahaman bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai macam kelompok yang terpinggirkan baik berdasarkan ras, agama, etnis maupun latar belakang, dibutuhkan kesadaran mengenai kesetaraan, keadilan dan kohesi sosial. (Ashraf, 2018).

Seluruh proses pengembangan dan pembangunan layanan pada perpustakaan berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan informasi pada masyarakat dan berkaitan terhadap usaha masyarakat untuk meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan dan potensi diri yang pada masa mendatang akan berdampak pada peningkatan kualitas dan mutu hidup masyarakat itu sendiri. Dalam mengatasi hal tersebut, untuk meningkatkan mutu dan kualitas hidup masyarakat pada era masa ini, perpustakaan perlu menerapkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang menyediakan layanannya guna meningkatkan potensi dan wawasan pada masyarakat (Sturges, 2004). Berdasarkan hal tersebut Perpustakaan Nasional RI (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) mempunyai peran penting dalam membina pengembangan layanan perpustakaan-perpustakaan di seluruh Indonesia menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaplikasian layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Arti inklusif sendiri memiliki ukuran yang sangat luas atau universal, namun arti inklusif sendiri berhubungan erat dengan persamaan hak individu serta keadilan dalam mendapatkan sumber utama dalam masyarakat seperti edukasi, sosial, ekonomi dan politik. Aspek-aspek tersebut saling berhubungan antara aspek satu dengan aspek lainnya, tidak dapat dipisahkan maupun berdiri sendiri, oleh sebab itu arti inklusif sangat berkaitan dengan kehidupan manusia yang berdasarkan keadilan dan persamaan hak setiap individu (Reid, 2005).

Kaitan istilah inklusif dengan kehidupan masyarakat memiliki arti bahwa masyarakat memiliki hak dalam beberapa sumber utama. Sebagai salah satu sarana

edukasi, riset, data, informasi, rekreasi serta preservasi bagi masyarakat, perpustakaan sendiri merupakan hak inklusif masyarakat, sesuai yang tertera dalam UU No.43 Tahun 2007 pada pasal 5, perpustakaan mengatur hak, dan kewajiban masyarakat, bahwa;

- a. masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.
- b. masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- c. masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Data dari *World Bank Indonesia Economic Quarterly Reports (IEQ)* melalui tes internasional menunjukkan lebih dari 55% orang Indonesia yang menyelesaikan pendidikan masih mengalami *functionally illiterate*. *Functionally illiterate* berarti minimnya kemampuan untuk membaca dan menulis dalam mengatur kehidupan sehari-hari dan pekerjaannya yang membutuhkan kemampuan membaca yang melebihi tingkat dasar.

Hal ini yang melatarbelakangi Perpustakaan Nasional RI sebagai perpustakaan yang memiliki kewajiban untuk membina seluruh perpustakaan di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat yang nantinya akan berdampak pada peningkatan wawasan, pengetahuan serta kualitas hidup masyarakat melalui pembentukan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Sesuai dengan yang tercantum pada UU No. 43 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 bahwa Perpustakaan Nasional RI merupakan lembaga pemerintah yang

memiliki kewajiban dalam membina perpustakaan di Indonesia, pasal tersebut berisi, bahwa;

“Perpustakaan Nasional merupakan lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara”.

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dicanangkan oleh Perpustakaan Nasional RI mulai dari tahun 2018. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan program replikasi dari program PerpuSeru yang sebelumnya dicanangkan oleh pihak swasta yang dibentuk pada tahun 2011 dengan dukungan dan kerjasama dari *Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI)* dan *Bill and Melinda Gates Foundation*, kemudian program PerpuSeru ini diserahkan kepada Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2018 dan terjadi perubahan nama program menjadi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Hal yang mendasari munculnya konsep program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah SDGs (*Sustainable Development Goals*). SDGs merupakan sebuah program yang menciptakan perubahan-perubahan menuju arah pembangunan berkelanjutan dengan berdasarkan hak asasi manusia agar perubahan ini mendorong dari sisi segala aspek ekonomi, sosial dan pembangunan hidup. SDGs sendiri memiliki empat pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Berikut merupakan gambar mengenai tujuan dari SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Gambar 1. 1 SDGs Tujuan (*Sustainable Development Goals*).



Sumber: <https://www.sdg2030indonesia.org/>

Gambar 1.1 merupakan 17 tujuan dari program SDGs, peluncuran program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial oleh Perpustakaan Nasional RI didasari oleh program pembangunan SDGs, hal ini merupakan bentuk kontribusi bidang perpustakaan terhadap pembangunan nasional. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial fokus membantu untuk mencapai tujuan SDGs dalam penanganan menghapus kemiskinan dengan meningkatkan wawasan masyarakat melalui layanan di perpustakaan dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

IFLA (*International Federation of Library Association and Institutional*) merupakan sebuah lembaga internasional untuk pengembangan kualitas layanan perpustakaan menghimbau kepada seluruh perpustakaan di berbagai belahan dunia

untuk ikut terlibat dalam kontribusi pembangunan nasional melalui SDGs ini yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengembangan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Perpustakaan Nasional melakukan pendekatan dengan 3 perspektif yaitu, *customer perspective*, *stakeholder & internal process perspective*, dan *learning & growth*.

Customer Perspective atau pandangan pengguna, yaitu dengan melakukan peningkatan pelayanan dan pemanfaatan perpustakaan baik dari segi koleksi dan program berdasarkan pandangan dari penggunanya. *Stakeholder & internal process perspective*, yaitu dengan cara melakukan peningkatan hubungan kerjasama antara perpustakaan maupun instansi terkait agar menjadi sebuah solusi untuk mengembangkan dan meningkatkan pembangunan dalam masyarakat. *Learning & growth*, yaitu dengan melakukan pengembangan pengetahuan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pada sarana dan prasarana, koleksi, dan seluruh pengelolaan perpustakaan.

Secara garis besar program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dibentuk oleh Perpustakaan Nasional RI didasari oleh kesepakatan dari program pembangunan SDGs, selain hal tersebut program ini juga dibentuk dengan didasari oleh pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang merata guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Berdasarkan latar belakang diatas, Perpustakaan Nasional RI berperan sebagai pembina dalam pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian, “Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi

Sosial: Upaya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Indonesia.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dalam penelitian, penelitian ini merumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana upaya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Indonesia melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Indonesia melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian manajemen perpustakaan umum terutama dalam mewujudkan fungsi pendidikan. Hasil penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan peluang penelitian selanjutnya untuk kajian peran perpustakaan berbasis inklusi sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

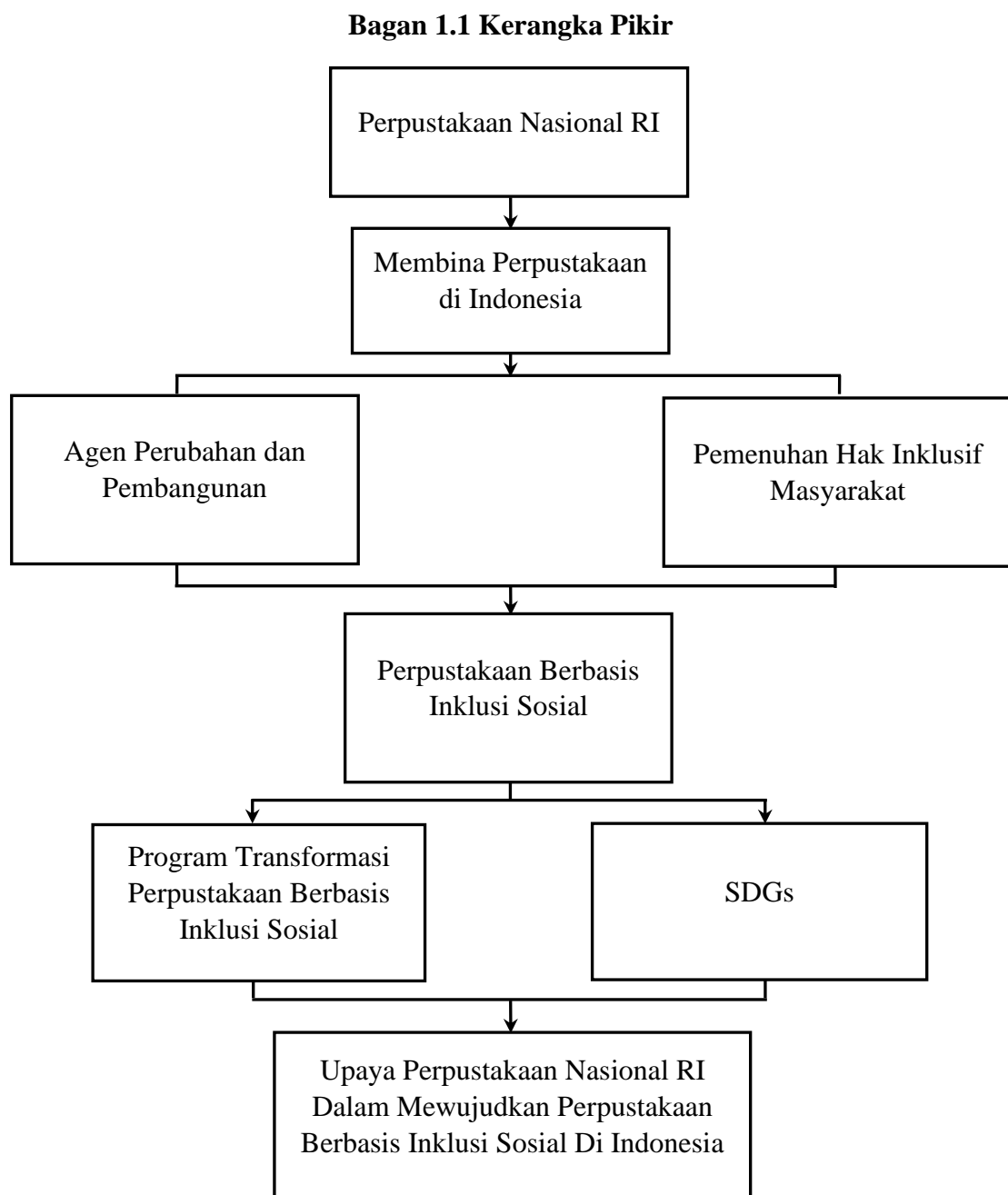
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi perpustakaan umum maupun jenis perpustakaan lain dalam menyediakan program-program perpustakaan berbasis inklusi sosial.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan. No.11, RT.11/RW.2, Gambir, Kec. Senen, Kota, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pengumpulan data hingga penulisan laporan penelitian ini dilakukan sejak Maret hingga November 2020.

1.6 Kerangka Pikir

Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya Perpustakaan Nasional RI dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Indonesia melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang diuraikan dalam bagan sebagai berikut:



Fokus penelitian ini adalah kepada upaya Perpustakaan Nasional RI dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Indonesia melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Perpustakaan Nasional RI mempunyai peran dalam membina seluruh perpustakaan di Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional dengan mengambil peran sebagai agen perubahan dan pembangunan bagi masyarakat Indonesia, juga berkontribusi dalam memenuhi hak inklusif masyarakat yang berupa hak untuk mendapatkan sumber utama seperti edukasi, sosial, ekonomi dan politik melalui penerapan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial,

Dalam mewujudkan hal tersebut Perpustakaan Nasional RI meluncurkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diluncurkan didasari oleh program pembangunan SDGs. Program pembangunan SDGs merupakan program pembangunan kearah berkelanjutan yang berdasarkan hak manusia yang mempunyai tujuan utama untuk menghapus kemiskinan, mengurangi kesenjangan dalam masyarakat dan melindungi lingkungan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan utama program SDGs yaitu untuk mengurangi kesenjangan dalam masyarakat dan menghapus kemiskinan, Perpustakaan Nasional RI berupaya untuk mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Indonesia melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai bentuk kontribusi bidang perpustakaan dalam pembangunan nasional untuk memenuhi hak masyarakat Indonesia guna meningkatkan kualitas hidup.

1.7 Batasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa batasan istilah penelitian, yaitu:

1. Perpustakaan Nasional

Perpustakaan Nasional dalam penelitian ini merupakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang mempunyai peran untuk membina perpustakaan di Indonesia untuk menerapkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

2. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam penelitian ini adalah sebuah program yang diluncurkan oleh Perpustakaan Nasional RI sebagai upaya untuk mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Indonesia.

3. Inklusi Sosial

Inklusi sosial dalam penelitian ini merupakan sebuah usaha untuk menempatkan derajat dan kemandirian individu dalam masyarakat di posisi yang setara untuk mencapai kualitas hidup yang ideal (Rawal, 2008). Dalam penelitian ini perpustakaan berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menerapkan layanan berbasis inklusi sosial.

4. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam penelitian ini merupakan layanan perpustakaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas dan koleksi yang tersedia di perpustakaan (Utami & Prasetyo, 2019).